

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran umum Pedukuhan Kadibeso

Untuk mengetahui hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu di pedukuhan Kadibeso Sabdodadi Bantul.

a. Letak Desa

Berdasarkan data monografi, Pedukuhan Kadibeso terletak di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sabdodadi memiliki lima pedukuhan yaitu Dukuh, Kadibeso, Keyongan, Manding, dan Neco. Jarak pedukuhan Kadibeso dari kota sebagai pusat wilayah ekonomi adalah:

- 1) Jarak ke kecamatan kurang lebih 1 km
- 2) Jarak ke kabupaten kurang lebih 3 km
- 3) Jarak ke ibukota kurang lebih 15 km

Data demografi berdasarkan populasi per wilayah yang ada desa Sabdodadi adalah :

Tabel Tiga.1 Data Demografi

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Lk	Pr
1	DUKUH	PONIJA	7	471	1433	698	735
2	KADIBESO	SURAMI	5	375	1146	555	591
3	KEYONGAN	GIYANTO SUMARSIH / TUGIMAN	8	496	1420	712	708
4	MANDING	EKO HERMAWAN	1	665	1982	987	995
5	NECO	SUBANDI	6	343	1031	506	525
TOTAL			38	2350	7012	3458	354

(sumber :sabdodadi.bantulkab.go.id)

Dari data diatas yang di ambil pada Oktober 2015 dapat dilihat bahwa pedukuhan kadibeso sebagai lokasi penelitian memiliki 375 kepala keluarga dengan sebesar 1146 jiwa. Jumlah laki-laki di pedukuhan Kadibeso adalah 555 dan jumlah perempuan sebesar 591.

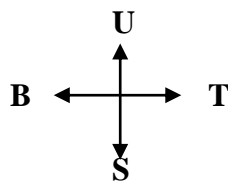
b. Batas Wilayah Pedukuhan Kadibeso

- 1) Sebelah Utara : Pedukuhan Neco
- 2) Sebelah Selatan : Desa Patalan
- 3) Sebelah Barat : Pedukuhan Manding
- 4) Sebelah Timur : Desa Sumberagung

c. Kondisi geografi

Kecamatan Sabdodadi berada di dataran rendah.Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 45 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota)

Kabupaten Bantul adalah 0,4 Km. Kecamatan Sabdodadi beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Bantul adalah 34 °C dengan suhu terendah 22 °C. Bentangan wilayah di Kecamatan Sabdodadi 98 % berupa daerah yang datar sampai berombak dan 2% berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Desa sabdodadi terletak di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, tepatnya di jalan Parang Tritis km 11,5 dengan koordinat 7°53'29"S 110°21'19".



Sumber: Google Map

Gambar 3.1 peta Desa Sabdodadi

d. Keadaan Demografis

1) Mata Pencaharia Penduduk

Mata pencaharian setiap pedukuhan yang ada di Desa Sabdodadi tidak sama. Perbedaan itu disebabkan oleh letak geografis yang tidak sama contohnya Pedukuhan Manding yang memiliki letak geografis dekat dengan jalan utama yaitu jalan Parangtritis sehingga pedukuhan tersebut menjadi pedukuhan industri kerajinan kulit. Sedangkan pedukuhan Kadibeso yang menjadi lokasi penelitian yang masih terdapat banyak lahan pertanian sehingga penduduk di Pedukuhan Kadibeso mayoritas sebagai petani padi Data demografi berdasarkan pekerjaan yang ada di Desa Sabdodadi adalah:

Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	n	%	N	%
1	PELAJAR/MAHASISWA	1392	19.85%	692	9.87%	700	9.98%
2	BURUH HARIAN LEPAS	125	17.84%	665	9.48%	586	8.35%
3	WIRASWASTA	95	13.62%	502	7.16%	453	6.46%
4	BELUM/TIDAK BEKERJA	90	12.86%	480	6.84%	422	6.02%
5	KARYAWAN SWASTA	73	10.45%	381	5.43%	352	5.02%
6	BURUH TANI/PERKEBUNAN	54	7.81%	279	3.98%	269	3.84%
7	MENGURUS RUMAH	40	5.83%	1	0.01%	408	5.82%

	TANGGA	9					
8	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2 2 8	3.25%	119	1.70%	109	1.55%
9	PENSIUNAN	9 3	1.33%	73	1.04%	20	0.29%
10	PETANI/PERK EBUNAN	5 0	0.71%	28	0.40%	22	0.31%
11	GURU	4 0	0.57%	12	0.17%	28	0.40%
12	PEDAGANG	3 7	0.53%	9	0.13%	28	0.40%
13	KEPOLISIAN RI (POLRI)	3 2	0.46%	31	0.44%	1	0.01%
14	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	2 6	0.37%	26	0.37%	0	0.00%
15	PERDAGANG AN	2 2	0.31%	4	0.06%	18	0.26%
16	TUKANG BATU	1 5	0.21%	15	0.21%	0	0.00%
17	KARYAWAN HONORER	1 3	0.19%	6	0.09%	7	0.10%
18	SOPIR	1 2	0.17%	12	0.17%	0	0.00%
19	PERANGKAT DESA	1 1	0.16%	9	0.13%	2	0.03%
20	TUKANG JAHIT	1 0	0.14%	0	0.00%	10	0.14%
21	PERAWAT	9	0.13%	3	0.04%	6	0.09%
22	PEMBANTU RUMAH TANGGA	8	0.11%	0	0.00%	8	0.11%
23	MEKANIK	5	0.07%	5	0.07%	0	0.00%
24	TUKANG KAYU	5	0.07%	5	0.07%	0	0.00%
25	KARYAWAN BUMN	4	0.06%	2	0.03%	2	0.03%
26	BIDAN	3	0.04%	0	0.00%	3	0.04%
27	TUKANG SOL SEPATU	3	0.04%	3	0.04%	0	0.00%
28	PELAUT	3	0.04%	3	0.04%	0	0.00%
29	DOSEN	3	0.04%	3	0.04%	0	0.00%
30	DOKTER	3	0.04%	0	0.00%	3	0.04%
31	TUKANG LAS/PANDAI BESI	3	0.04%	3	0.04%	0	0.00%
32	TRANSPORTA SI	3	0.04%	2	0.03%	1	0.01%
33	TUKANG CUKUR	2	0.03%	2	0.03%	0	0.00%
34	KONSTRUKSI	2	0.03%	2	0.03%	0	0.00%
35	SENIMAN	2	0.03%	2	0.03%	0	0.00%
36	PETERNAK	2	0.03%	2	0.03%	0	0.00%

37	KEPALA DESA	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
38	PENATA RAMBUT	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
39	PILOT	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
40	BURUH NELAYAN/PE RIKANAN	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
41	TUKANG LISTRIK	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
42	ANGGOTA DPR-RI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
43	PENELITI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
44	PENATA BUSANA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
45	ANGGOTA BPK	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
46	PIALANG	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
47	PENGACARA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
48	WAKIL PRESIDEN	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
49	TABIB	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
50	ARSITEK	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
51	BURUH PETERNAKAN	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
52	ANGGOTA KABINET KEMENTERIA N	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
53	PERANCANG BUSANA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
54	KONSULTAN	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
55	GUBERNUR	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
56	IMAM MASJID	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
57	BUPATI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
58	NELAYAN/PE RIKANAN	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
59	PASTOR	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
60	APOTEKER	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
61	WALIKOTA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
62	USTADZ/MUB ALIGH	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
63	PENYIAR TELEVISI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
64	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
65	PROMOTOR ACARA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
66	PENATA RIAS	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
67	KARYAWAN BUMD	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
68	ANGGOTA DPD	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
69	PRESIDEN	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

70	PARANORMA L	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
71	NOTARIS	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
72	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
73	PARAJI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
74	AKUNTAN	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
75	DUTA BESAR	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
76	BIARAWATI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
77	PENTERJEMA H	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
78	WAKIL GUBERNUR	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
79	PENDETA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
80	WAKIL BUPATI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
81	INDUSTRI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
82	WARTAWAN	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
83	PSIKIATER/PS IKOLOG	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
84	WAKIL WALIKOTA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
85	JURU MASAK	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
86	PENYIAR RADIO	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
87	TUKANG GIGI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
88	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	BELUM MENGISI	1 7 0	2.42%	75	1.07%	95	1.35%
	TOTAL	7 0 1 4	100%	3459	49.32%	3555	50.68%

(sumber :sabdadadi.bantulkab.go.id)

2) Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan karena pendidikan dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kemajuan dalam berfikir dan berkembang.

Di bawah ini adalah tabel tingkat pendidikan di Desa Sabdadadi.

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Desa Sabdodadi

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1	SLTA / SEDERAJAT	19	27.75%	1032	14.71%	915	13.04%
		47					
2	TAMAT SD / SEDERAJAT	17	24.88%	827	11.79%	919	13.10%
		46					
3	TIDAK / BELUM SEKOLAH	11	15.83%	530	7.55%	581	8.28%
		11					
4	SLTP/SEDER AJAT	94	13.44%	465	6.63%	478	6.81%
		3					
5	BELUM TAMAT SD/SEDERAJ AT	59	8.45%	296	4.22%	297	4.23%
		3					
6	DIPLOMA IV/ STRATA I	43	6.16%	212	3.02%	220	3.14%
		2					
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	19	2.74%	74	1.05%	118	1.68%
		2					
8	DIPLOMA I / II	63	0.90%	22	0.31%	41	0.58%
9	STRATA II	38	0.54%	25	0.36%	13	0.19%
10	STRATA III BELUM MENGISI	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
		-	-0.70%	-23	-0.33%	-26	-0.37%
	TOTAL	49					
		70	100%	3460	49.31%	3557	50.69%
		17					

(sumber :sabdodadi.bantulkab.go.id)

3) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1	ISLAM	6873	97.95%	3393	48.35%	3480	49.59%
2	KRISTEN	77	1.10%	36	0.51%	41	0.58%
3	KATHOLIK	115	1.64%	53	0.76%	62	0.88%
4	HINDU	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
5	BUDHA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	KHONGHUCU	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	BELUM MENGISI	-49	-0.70%	-23	-0.33%	-26	-0.37%
	TOTAL	7017	100%	3460	49.31%	3557	50.69%

(sumber :sabdodadi.bantulkab.go.id)

2. Bagi Hasil Pertanian di Pedukuhan Kadibeso Sabdodadi Bantul

Pedukuhan Kadibeso mempunyai luas lahan pertanian seluas 3,3 Ha yang menyebabkan mayoritas masyarakat di pedukuhan kadibeso bekerja sebagai petani padi. Petani padi pada hal ini adalah pemilik sawah maupun buruh tani atau penggarap sawah. Pertanian di Pedukuhan tersebut memegang peranan yang sangat penting mengingat masih rendahnya taraf pendidikan pada pedukuhan tersebut. Selain itu kurangnya *skill* dan bantuan dari pemerintah desa juga menyebabkan masyarakat yang berada di Pedukuhan Kadibeso tidak mempunyai pilihan lain kecuali sebagai petani padi.

Pedukuhan Kadibeso belum terdapat lapangan pekerjaan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan lulusan SMP dan SMA. Hal ini berbeda dengan Pedukuhan Manding yang terdapat sentra industri kerajinan kulit yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang tidak mempunyai ketrampilan khusus.

Pemilik sawah adalah seseorang yang mempunyai satu atau lebih lahan pertanian (sawah). Pertanian di Pedukuhan Kadibeso dalam pengerjaannya masih bersifat tradisional. Padi yang sudah siap panen pada umumnya menggunakan mesin untuk memisahkan padi dengan batangnya namun di pedukuhan kadibeso masih menggunakan secara manual yaitu dengan cara di pukul ke bambu yang memang sudah di buat sebelumnya oleh penggarap. Pemisahan padi dengan batangnya biasa di sebut dengan istilah *gepyok*.

Sedangkan yang dimaksud penggarap adalah seseorang yang tidak mempunyai sawah tetapi bersedia untuk mengelola lahan pertanian (sawah) milik orang lain. Penggarap sawah biasanya membagi menjadi tiga tahapan dalam pengerjaannya. Tahapan pertama biasanya di sebut dengan istilah *tandur*. *Tandur* adalah penanaman bibit padi dengan menggunakan bilah bambu sebagai pengukur jarak. *Tandur* biasanya di kerjakan oleh empat orang. Tahapan kedua adalah *ngerabok*. *Ngerabok* adalah penyemprotan atau pemberian pupuk yang dilakukan setelah padi berusia satu minggu dan dilakukan berulang-ulang minimal 2 kali dalam satu bulan. Tahapan terakhir adalah *gepyok*. *Gepyok* adalah pemisahan antara batang padi dengan benih padi atau biasa disebut dengan *gabah*.

Bagi hasil dalam lahan pertanian yang di lakukan oleh masyarakat Pedukuhan Kadibeso adalah mengguankan sistem *paron*.

Menurut Mardiwiyono (80 Tahun) penggarap sawah mengatakan bahwa :

*“Paron niku maro sek kagungan sawah separih sik nanem separih. Nggih biasane kulo angsal 3 juta niku kulo 1,5 juta pak Gito ingkang gadah sawah 1,5 juta. Misale enten gagal panen sek gadah sawah mboten angsal nopo-nopo. Sek buruh nggih mboten angsal nopo-nopo neng pun rugi soale pun medalke biaya kathah kagem tumbas rabok. Biasanipun kulo tumbas rabok telas Rp 700.000”.*¹ (Paron itu maro yang mempunyai sawah sebagian yang mengelola sebagian. Biasanya saya mendapat 3 juta dari 3 juta itu saya mendapatkan 1,5 juta dan pak Gito sebagai yang mempunyai sawah mendapatkan 1,5 juta. Misalnya ada gagal panen yang punya sawah tidak dapat apa-apa, yang mengelola

¹wawancara dengan Mardiwiyono, penggarap sawah, tanggal 20 Maret 2016.

juga tidak dapat apa-apa tetapi rugi soalnya sudah mengeluarkan biaya untuk keperluan membeli pupuk.

Menurut Hari Martuti (40 Tahun) mengatakan bahwa :

*“Paron itu ya pokoknya padi panen dapet 12 karung masing-masing 6 karung. Kalau kemaren dari 500 m2 separonya saya dapet 3,5 karung. Biasanya yang dibagikan itu berasnya bukan uang hasil panenanya setelah diual, untuk biaya-biaya semua ditanggung oleh penggarapnya pokoknya yang punya sawah tinggal terima bersih. jika terjadi kerugian maka yang paling rugi adalah penggarap soalnya sudah mengeluarkan biaya”.*²

Pelaksanaan bagi hasil di Pedukuhan Kadibeso dengan sistem *paron* adalah pembagian hasil pertanian yang dibagikan dengan jumlah yang sama. Misalkan dari hasil panen mendapatkan 12 karung maka di bagi secara rata 6 karung untuk penggarap dan 6 karung untuk pemilik sawah. Biaya yang muncul dalam proses pengelolaan lahan pertanian meliputi benih padi, pupuk, dan alat pertanian di tanggung oleh penggarap. Jika terjadi kerugian (gagal panen) maka pemilik sawah tidak mendapatkan apapun, sedangkan penggarap juga tidak mendapatkan hasil walaupun sudah mengeluarkan biaya.

a. Perjanjian Bagi Hasil Dengan Menggunakan Sistem Paron

Dalam perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem *paron* di Pedukuhan Kadibeso biasanya masyarakat hanyamenggunakan perjanjian secara lisan hal ini dilakukan secara turun temurun. Dalam sistem *paron* pemilik sawah lah yang biasanya mencari penggarap untuk meminta menggarap sawahnya.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Madyo Pawiro (75 Tahun) menyatakan sebagai berikut :

²Wawancara dengan Heri Martuti, Pemilik sawah tanggal 20 maret 2016.

*“Sistem paron kuwi ono wes ket jaman kakek ninek, wes ora kelingan nek kiro-kiro yo tahun 1951. Biasane yo sek golek yo sek duwe sawah, hake sek duwe sawah akon sek garap, sek garap yo saguh. paron kuwi ora eneng berjanjen nek wes eleh yo pasrah, nek wes ora cocok jaluk di tanduri wong liyo”.*³ (Sistem paron itu sudah ada dari aman nenek moyang, sudah lupa kira-kira dari tahun 1951 Biasanya yang mencari yang mempunyai sawah, haknya yang punya sawah mencari penggarap, penggarap juga bersedia. paron itu tidak ada perjanjiana kalau penggarap sudah bosan ya pasrah, tetapi kalau pemilik sawah sudah tidak cocok minta untuk di kelola oleh orang lain).

Setelah wawancara lebih mendalam mengenai alasan mengapa tidak menggunakan perjanjian secara tertulis madyo pawiro mengungkapkan :

“nak go tulis menulis ki mengko kewuhan luweh repot, okeh sek di urus. Lagian sek garap sawah kan uwes kulino wes koyo sedulur dadi yo percoyo-percoyo wae.” (jika menggunakan perjanjian secara tertulis banyak yang di urus dan repot. Penggarap sawah juga sudah di anggap seperti keluarga sendiri jadi percaya saja)

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian, pada pasal 3 berbunyi “Semua perjanjian bagi hasil harus di buat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”.

Dapat dianalisis dalam pembagian bagi hasil dengan sistem *paron* di Pedukuhan Kadibeso bertolak belakang antara kenyataan dengan Undang-undang No 2 tahun 1960 Tentang bagi Hasil Pertanian. Masyarakat

³Wawancara dengan Madyo pawiro, pemilik sawah pada tanggal 21 Maret 2016.

Pedukuhan Kadibeso banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai Bagi Hasil Pertanian yang di atur dalam Undang-undang No 2 1960. Bentuk perjanjian lisan ini berlaku hingga saat ini, walaupun secara lisan tetapi sampai saat ini belum pernah terjadi perselisihan hingga sampai alur hukum.

b. Alasan Terjadinya Sistem Paron

1) Alasan pemilik sawah

Perjanjian bagi hasil dengan sistem *paron* pada dasarnya terjadi dikarenakan pemilik sawah mempunyai pekerjaan lain sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan sawahnya, oleh karena itu pemilik sawah mencari orang yang bersedia menggarap sawahnya dengan sistem *paron*. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik sawah Heri Martuti (40 Tahun) menyatakan sebagai berikut :

“Karena saya mempunyai pekerjaan lain mas jadi saya tidak punya waktu untuk bertani. Selain itu menggarap sawah itu uga tidak sembarangan orang bisa mengerjakan harus dapat memilih benih yang bagus dan pupuk yang cocok.maka saya menawarkan sistem paron kepada orang yang mau.”⁴

Berdasarkan wawancara dengan Joni (36 Tahun) dan Madyo Pawiro (75 Tahun)

“Karena saya selonya cuma hari minggu saja jadi saya minta tolong sama orang lain. Garap sawah itu ya gak bisa

⁴Wawancara dengan Heri Martuti, Pemilik sawah tanggal 20 maret 2016.

kalau Cuma satu orang tapi saya kalau selo ya ikut ke sawah".⁵

"Aku wes wong tuwo le wes ra kuat meneh nak kon neng sawah, dinggo mlaku we angel".⁶ (saya sudah tua mas sudah tidak kuat lagi, untuk berjalan saja susah)

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas alasan pemilik sawah melakukan perjanjian dengan sistem paron:

- a) Mempunyai pekerjaan lain.
- b) Tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya.
- c) Tidak mempunyai *skill* yang cukup untuk menggarap sawah.

2) Alasan penggarap sawah

Pada dasarnya penggarap melakukan bagi hasil pertanian dengan sistem *paron* dikarenakan tidak adanya pekerjaan lain dan tidak mempunyai lahan garapan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga penggarap tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggarap sawah milik orang lain. Hal ini seperti yang di ungkapkan poniran (62 tahun) sebagai berikut:

"Keuntungane enten sistem paron niku kulo dados gadah penghasilan ge nyambung urip lan gadah kesibukan. kulo purun maro soale geh pripun maleh kulo isane geh namung buruh tandur".⁷ (Keuntungan dari sistem *paron* saya jadi mempunyai penghasilan untuk menyambung hidup dan mempunyai kesibukan. saya mau maro dikarenakan yang bisa saya kerjakan adalah sebagai penggarap sawah

⁵Wawancara dengan Joni, pemilik sawah tanggal 20 maret 2016.

⁶Wawancara dengan Madyo Pawiro, pemilik sawah tanggal 21 maret 2016.

⁷Wawancara dengan Poniran, penggarap sawah pada tanggal 21 Maret 2016.

Peneliti menanyakan lebih dalam mengenai selain bertani *skill* dan pendidikan yang dimiliki oleh bapak Poniran :

“sek kulo sageti gih namung tandur niku paling gih kaleh buruh kongkonan. Nek enten sek nyuwun tulung ngresiki plataran nopo kon ngurus tanduran. Kulo namung lulusan SMP”(yang saya bisa hanya menggarap sawah sam menjadi orang suruan semisal ada yang minta tolong untuk membersihkan halaman taua menyirami/merawat tanaman).

Sedangkan Poniem (75 Tahun) mengatakan :

“yo piye yo le nak ditakoni alasane yo tekmenne ket biyen yo wes gaweane ngono kuwi. Lagian yo wes kebacut berjanji karo sek duwe sawah”.⁸ (ya kalau di tanya alasannya dikarenakan dari dulu memenag sudah bertani. Selain itu juga sudah terlanjur ada perjanjian dengan pemilik sawah)

Jadi (35 Tahun) mengatakan:

“Ya karena tidak punya sawah, jadi saya garap sawah milik orang lain. Walaupun saya juga mempunyai ekerjaan lain tetapi hasil dari garap sawah milik orang lumyan bisa buat tambah-tambah”.⁹

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas alasan penggarap sawah melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem paron:

- a) Tidak mempunyai pekerjaan lain
- b) Tidak mempunyai sawah
- c) Karena untuk mencukupi ekonomi keluarga
- d) Tidak memiliki *skill* yang cukup

⁸Wawancara dengan poniem, penggarap sawah pada tanggal 20 Maret 2016.

⁹Wawancara dengan Jadi, penggarap sawah pada tanggal 20 Maret 2016.

c. Pembagian Hasil Penen dan Kerugian dengan Menggunakan Sistem *Paron* di Pedukuhan Kadibeso

Pembagian hasil pertanian dengan sistem *paron* menurut masyarakat Pedukuhan Kadibeso sudah adil dikarenakan dengan adanya sistem *paron* masyarakat kurang mampu menjadi terbantu dalam segi ekonominya. Selain itu dikatakan adil dikarenakan jika menyewa tanah kas desa mengeluarkan biaya yang cukup besar tidak sebanding jika menggunakan sistem *paron*.

Berdasarkan wawancara dengan Surami (52 Tahun) mengatakan bahwa:

“Gih nak rumangsa kulo gih adil wong nak nyewo tanah kas niku gih larang,gek niku gih karepe sing garap”.¹⁰(kalau menurut saya sudah adil dikarenakan jika menyewa tanah kas desa itu mahal. Lagian yang minta untuk *paron* itu dari ihak penggarap. (wawancara dengan Surami, pemilik sawah, tanggal 21 Maret 2016)

Dalam sistem *paron* jika terjadi kerugian yang sangat dirugikan adalah penggarap. Penggarap dalam satu kali musim panen mengeluarkan setidaknya Rp.700.000 – Rp.1.000.000 untuk mengelola sawah tersebut. Penggarap mengeluarkan biaya tersebut untuk pembelian benih padi, pupuk,dan alat pertanian yang di gunakan untuk mengelola sawah tersebut. Biaya yang sudah dikeluarkan jika terjadi gagal panen maka pemilik sawah tidak menanggung biaya yang sudah dikeluarkan oleh penggarap walaupun pemilik sawah tidak mendapatkan hasil pertaniannya

¹⁰Wawancara dengan surami, pemilik sawah pada tanggal 21 Maret 2016.

dikarenakan gagal panen. Meskipun penggarap sudah menanggung biaya tetapi penggarap juga tidak mendapatkan hasil dari sawah yang dia kelola. Sistem *paron* memang terlihat tidak adil, namun sampai dengan saat ini belum pernah terjadi perselisihan atau kesalah pahaman antara pemilik sawah dengan penggarap jika terjadi gagal panen penggarap tetap bersedia untuk menggarap sawah di musim berikutnya.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap, Yatin (78 tahun) menyatakan:

*“Nek misal e gagal panen yo sek paling rugi yo aku le,aku garap sawah 300 m2 kuwi ngenteke biaya Rp.750.000 an dinggo werno-werno yen gagal panen sek duwe sawah ora oleh opo-opo sek garap yo ora oleh opo-opo neng aku rugi duwit Rp.750.000 an mau seng wes tak toke dinggo werno-werno mau.intine sek duwe sawah ora ngetoke duit”.*¹¹(Jika terjadi gagal panen maka yang paling di rugikan saya mas,saya mengelola sawah 300 m2 itu menghabiskan biaya Rp.750.000 an untuk keperluan sawah jika gagal panen pemilik sawah tidak mendapatkan hasil panen dan penggarap juga tidak mendapatkan apa-apa tetapi saya sudah rugi uang sebesar Rp.750.000 an tadi yang sudah saya keluarkan untuk keperluan sawah tadi.intinya pemilik sawah tidak mengeluarkan uang).

Dari pernyataan diatas, dapt disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dengan menggunakan sistem *paron* jika teradi kerugian maka yang menanggung biaya yang sudah dikeluarkan adalah penggarap sawah meskipun antara pemilik dan penggarap sawah sama-sama tidak mendapatkan hasil dari pertaniannya.

¹¹Wawancara dengan Yatin, penggarap sawah pada tanggal 22 Maret 2016.

Sistem *paron* yang sudah berkembang di Pedukuhan Kadibeso adalah sistem satu-satunya yang digunakan masyarakat dalam bagi hasil pertaniannya. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan Jadi (35 Tahun) mengatakan bahwa:

“Selain sistem paron tidak ada sistem yang digunakan masyarakat Pedukuhan Kadibeso dalam pembagian pertaniannya”.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Poniyeem (75 tahun) mengatakan:

“Mboten enten mas, entene gih namung paron niku”.¹³(Tidak ada mas, yang ada hanya sistem paron itu”.

Sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh Joni (36 Tahun) yang menyatakan:

*“Setau saya ya cuma paron atau maro itu.”*¹⁴

Dari pernyataan beberapa responden dapat disimpulkan bahwa sistem paron adalah sistem bagi hasil satu-satunya yang digunakan masyarakat Pedukuhan Kadibeso dalam bagi hasil pertaniannya.

d. Kendala Petani Padi Dalam Pengelolaan Lahan Pertaniannya

Padi adalah tanaman yang rentan dengan pengaruh cuaca dan ketersediaan air. Faktor angin juga berpengaruh dalam proses pengelolaan tanaman padi. Hal ini sama dengan yang diungkapkan Heri Martuti (40 Tahun) bahwa:

“Kesulitan dalam menggarap sawah itu ya faktor angin mas, seperti -akhir ini anginnya kencang itu petani ya agak

¹²Wawancara dengan Jadi, penggarap sawah pada tanggal 20 Maret 2016.

¹³Wawancara dengan Poniyeem, penggarap sawah pada tanggal 21 Maret 2016.

¹⁴Wawancara dengan Joni, pemilik sawah pada tanggal 20 Maret 2016.

*sulit.padi yang belum ada isinya kena angin jadi pada kopong atau gabuk”.*¹⁵

Sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh Jadi (35 Tahun) yang menyatakan:

*“Yang paling susah itu untuk pengairannya mas, sebagai petani suka mencari air hingga malam hari”.*¹⁶

e. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Konsep Bagi Hasil Sesuai Dengan Konsep Ekonomi Islam

Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil menurut Islam. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwa dalam Islam di ajarkan , bekerja sama dalam bentuk apapun harus didasari dengan kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab atas amanah yang diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan Mardiwiyono (80 Tahun) mengatakan bahwa:

*“Miturut kulo dadi nak Islam niku mboten keno goroh, kudu jujur, kudu netepi janji. terus nak nanem misale hasile kathah di paro tenan. mboten terus kulo ngendiko yen hasil e sekedik ben kulo angsal kathah”.*¹⁷ (Menurut saya jika Islam itu tidak boleh berbohong, harus jujur, harus menepati janji. jika hasilnya banyak maka di bagi sesuai dengan apa hasil yang ada. tidak terus mengatakan bahwa hasil panen tersebut sedikit supaya saya mendapatkan hasil yang banyak).

Sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh Surami (52 Tahun) yang menyatakan:

¹⁵Wawancara dengan Heri Martuti, pemilik sawah pada tanggal 20 Maret 2016.

¹⁶Wawancara dengan Jadi, penggarap sawah pada tanggal 20 Maret 2016.

¹⁷Wawancara dengan Mardiwiyono, penggarap sawah pada tanggal 20 Maret 2016.

“Menurut Islam kiyu bagi-bagi, kan mestine perjanjian sing duwe karep.kan sing garap ora dipekso karo sek duwe sawah”.¹⁸(Menurut Islam itu bagi-bagi, perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap. Tidak ada paksaan dalam perjanjian tersebut antara pemilik sawah dengan penggarap).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Pedukuhan Kadibeso belum mengetahui tentang bagi hasil secara spesifik yang sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Kurangnya sosialisasi tentang Ekonomi Islam menjadi salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Ekonomi Islam. Dalam sistem *paron* masyarakat lebih mementingkan rasa kepercayaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab antara pemilik sawah dengan penggarap.

B. Pembahasan Praktik Bagi Hasil Petani Pedukuhan Kadibeso Dalam Persektif Islam

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara terhadap pemilik sawah dan penggarap sawah mengenai praktik bagi hasil petani padi yang ditinjau dari konsep Ekonomi Islam di Pedukuhan Kadibeso Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan tentang praktik bagi hasil petani padi yang ditinjau dari konsep Ekonomi Islam di Pedukuhan Kadibeso Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dampak terhadap ekonomi masyarakat di Pedukuhan Kadibeso.

¹⁸Wawancara dengan Surami, pemilik sawah pada tanggal 21 Maret 2016.

Praktik bagi hasil masyarakat dalam pertanian di Pedukuhan kadibeso menggunakan sistem *paron*. Sistem *paron* adalah sistem perhitungan antara pemilik modal (sawah pertanian) dengan penggarap. Pemilik sawah biasanya meminta kepada penggarap untuk mengelola sawahnya hingga musim panen tiba. Setelah musim panen tiba kemudian padi yang sudah menjadi gabah di bagi hasilkan 50:50 antara pemilik sawah dengan penggarap. Sistem *paron* telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Pedukuhan Kadibeso.

Berkaitan dengan sistem bagi hasil tanah pertanian dengan menggunakan sistem *paron* telah berlangsung sejak lama dan masih berlaku hingga sekarang. Penggarap mengupayakan agar sawah garapannya memberikan hasil yang sebaik-baiknya, namun dalam realitanya terdapat banyak kendala seperti faktor alam. Penggarap harus bersungguh-sungguh dalam pengerjaannya agar memperoleh hasil yang baik.

Dalam Islam sudah diatur mengenai bagi hasil sesuai dengan konsep Islam, yang boleh dilakukan dan yang dilarang dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari Al-Quran dan beberapa hadis berikut:

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سَخِرِيَا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan

dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian lagi mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ ﴿رواه البخار﴾

Artinya:

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertanian (palawija)” (H.R Muslim)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نَكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرَبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهَبْنَا عَنْ ذَلِكَ ﴿رواه البخار﴾

Artinya:

Berkata Rafi' bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari)

أَنَّ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَذَكَرَ أَنْبَعُضَ عُمُومَتُهُ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيَزِرْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِبْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى" ﴿﴾
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ ﴿﴾

“Diriwayatkan oleh Râfi’ bin Khudaij R.A., ia berkata : Suatu ketika ketika kami sedang mengadakan pengolahan lahan dengan bagi hasil

tertentu (mukhâbarah), kemudian datanglah kepadanya sebagian dari keluarga pamannya dan mengatakan : Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang akan sesuatu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami, dan sungguh ketaatan atas Allah Swt. Dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kami. Lalu kami mengatakan: dan apakah perkara itu? Ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda : Barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami. Dan janganlah ia menyewakan sepertiganya, atau seperempatnya, dan tidak juga dengan makanan.” (H.R. Muslim dan Abu Dawud)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ
فَرِيمًا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَهَنَانَا عَنْ ذَلِكَ ﴿رواه البخار﴾

Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: “Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzâra'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (H.R. Bukhari).

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرُونَ
الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ
يَسْتَنْثِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَهَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ
لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالْدَيْرِ وَالِدِرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدَيْرِ وَالِدِرْهَمِ
﴿رواه البخار﴾

“Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi', bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi' menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham. (HR Bukhari).

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بِنْتَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَغْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَا رَجُلَيْنِ
 اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تَكْرُوا الْمُزَارِعَ عَسَمِعْتُمْ قَوْلَهُ لَا تَكْرُوا
 الْمُزَارِعَ ﴿رَوَاهُ النَّاسِيُّ ٤﴾

Dari Urwah ibnu Zubair berkata, berkata Zaid bin Tsabit: “Semoga Allah mengampuni Rafi’ ibnu Khadij. Demi Allah, Aku lebih mengetahui hadis daripada ia. Rasulullah saw melarang menyewakan tanah, dikarenakan pada suatu hari ada dua orang yang bunuh membunuh sebab masalah penyewaan tanah, maka dari itu beliau bersabda: “Jika kamu bertengkar seperti ini, janganlah kamu menyewakan tanah”Rupanya ia hanya mendengar sabda beliau: “Janganlah kamu menyewakan tanah”.(H.R.An Nasa’i)

Dari beberapa hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya Islam membolehkan kerjasama dalam bidang pertanian dengan sistem bagi hasil. Sedangkan hadis yang melarang akad Muzaraah (kerjasama dalam pertanian) adalah ketika pemilik sawah menyewakan sebagian tanahnya kepada penggarap atau membagi atas tanah garap terlebih dahulu Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmad Sarwat yang menyatakan bahwa muzara’ah yang diharamkan semisal, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu. Hal ini dianggap *gharar* karena terdapat ketidak jelasan pada bagi hasil yang akan diperoleh. Misalkan, dari lahan 1.000 m saat terjadi panen kemudian lahan 400m terjadi gagal panen maka pemilik lahan mengalami kerugian begitu juga

sebaliknya apabila yang terjadi gagal panen pada lahan 600 m maka pihak penggaraplah yang dirugikan.¹⁹

Selain itu dalam pembahasan *muzara'ah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufair ibn Huzail (728-77 M), pakar fiqh hanafi, berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak boleh. Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah hadis yang bersumber dari Tsabit Ibnu adh-Dhahhak:

عَنْ ثَابِتِ ابْنِ ضَحَّاکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
الْمُزَارَعَةِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza'rah “ (H.R. Muslim)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail obyek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi tidak jelas.²⁰

Sedangkan menurut Abu Yusuf (113-182H/731-798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa *muzara'ah* hukumnya boleh, dikarenakan akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah. Akad *muzara'ah*

¹⁹ Ahmad Sarwat. *Fiqh Muamalah*, Kamus Syariah.2009, hlm 120

²⁰ Mulyo Winarsih, “Pengaruh Muzara'ah Terhadap Pendaatan Masyarakat Desa Kalipasu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah”, Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm 35

bertujuan untuk saling membantu antara pemilik sawah dengan penggarap sawah.²¹

Sistem *paron* yang berkembang dalam masyarakat Pedukuhan Kadibeso adalah sistem dimana pemilik sawah memberikan hak garap sawahnya atau tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, keuntungan baru dapat diketahui setelah tiba masa panen dimana keuntungan dibagi sama rata 50:50. Hal ini berbeda dengan sistem sewa tanah yang maksud dalam hadis diatas pemilik sawah sebelum masa panen tiba sudah mendapatkan keuntungan dari hasil sewa sawah tersebut. Sedangkan jika hasil panen tersebut tidak sesuai dengan harga sewa yang sudah dibayarkan di muka oleh penggarap, maka dalam hal ini terdapat bentuk spekulasi. Spekulasi yang dimaksud adalah jika hasil panen lebih besar dari pada harga sewa sawah maka penggarap akan mendapatkan untung, tetapi jika hasil panen lebih sedikit dari pada harga sewa sawah maka penggarap merugi.

Dalam sistem *paron* bila terjadi kerugian atau gagal panen maka pemilik sawah tidak menanggung biaya yang sudah dikeluarkan oleh penggarap untuk pengelolaan tersebut. Penggarap dalam menggunakan sistem *paron* telah mengetahui resiko bila terjadi kerugian atau gagal panen sebelum pemilik sawah menyerahkan sawahnya untuk digarap. Kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap dilakukan sebelum pemilik sawah menyerahkan sawahnya, dalam hal ini tidak ada unsur

²¹ Ibid, hlm 37

paksaan pemilik sawah terhadap penggarap. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dari surat diatas dijelaskan bahwa Islam melarang perniagaan atau muamalah dengan cara yang batil. Perniagaan atau muamalah yang diperbolehkan adalah perniagaan yang dimana terdapat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bekerja sama atau saling rela. Penjelasan tersebut sesuai dengan kerja sama bagi hasil pertanian menggunakan sistem *paron* yang terdapat perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap yang kedua belah pihak sudah saling memahami dan menyetujui kerja sama tersebut meskipun secara lisan. Menurut Ahmad Sarwat keuntungan itu harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui, syirkah tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan. Keuntungan itu juga harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentasi tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka syirkah itu tidak sah. Karena

ada kemungkinan bahwa kerja sama tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan syirkah dalam keuntungannya.²²

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pedukuhan Kadibeso Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa di desa tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan. Tidak terdapat perjanjian tertulis di atas materai sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan bagi hasil.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh 2 orang saksi dari masing-masing pemilik dan penggarap. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Pedukuhan Kadibeso yang Perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem *paron* di dasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan. Akibatnya saat terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara pemilik sawah dengan penggarap tidak ada bukti yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun sampai saat ini belum pernah terjadi perselisihan atau kesalahpahaman pada masyarakat Pedukuhan Kadibeso.

²² Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah*, Kamus Syariah.2009, hlm 80

Menurut Abdullah Jayadi dalam Islam mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut:

1. *Al-Hurrijah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*Freedom of Making Contract*). Bebas dalam menentukan obyek perjanjian serta bebas menentukan cara penyelesaian sengketa. Dalam membuat perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang (teguh) kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

2. *Al-Musawah* (kesamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*Bergaining Position*) yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad atau perjanjian setiap

pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

3. Al-Adalah (Keadilan)

Pelaksana asas ini dalam suatu perjanjian akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang.

4. Al-Ridho (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *miss-statement*. Dasar hukum adanya asas kerelaan

dalam pembuatan perjanjian dapat dibaca dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

5. *Ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa didalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum mengenai asas Ash-shidq didasarkan pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.

6. *Al-Kitabah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Quran surat Al-

Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga didalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi dan prinsip tanggung jawab individu.²³

Dari asas-asas hukum perjanjian dalam Islam menurut Abdullah Jayadi diatas dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat Pedukuhan Kadibeso hukum perjanjian bagi hasil dengan sistem paron tidak sesuai dengan asas-asas konsep perjanjian dalam Islam. Menurut masyarakat Pedukuhan kadibeso perjanjian secara lisan sudah dianggap sah tanpa memandang Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Pada Pedukuhan Kadibeso konflik antara pemilik dan penggarap sawah tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil dengan sistem paron. Hal ini dikarenakan pemilik sawah maupun penggarap sama-sama merasa diuntungkan dan sama-sama merasa membutuhkan. Selain itu masyarakat di Pedukuhan Kadibeso memiliki rasa saling percaya dan kekeluargaan antara satu dengan yang lain. Sehingga kerjasama dengan sistem ini dapat terus berlangsung. Hal ini dikarenakan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya. Kewajiban pemilik sawah adalah memberikan sawahnya kepada penggarap untuk di kelola dengan jangka waktu yang telah

²³Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011, hlm 18-20

disepakati. Sedangkan kewajiban penggarap adalah memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan kualitas yang maksimal.

Hak pemilik sawah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen. Hak penggarap adalah memperoleh perlakuan yang baik dan perlakuan yang adil dari pemilik sawah. Setelah perjanjian selesai maka penggarap wajib mengembalikan sawah kepada pemilik sawah. Begitu juga pemilik sawah tidak dapat meminta sewaktu-waktu sawah yang sudah diserahkan kepada penggarap untuk dikelola tanpa alasan yang jelas.

Dalam realitanya perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem *paron* memberikan banyak manfaat pada masyarakat di Pedukuhan Kadibeso. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan para petani di Pedukuhan Kadibeso mengatakan bahwa belum pernah terjadi perselisihan antara pemilik dengan penggarap sawah akibat pembagian hasil dengan sistem *paron*.

Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Ekonomi Islam. Sistem *paron* yang sudah lama berkembang di Pedukuhan kadibeso memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Pedukuhan tersebut. Pemilik sawah merasa terbantu dengan adanya sistem *paron* ini dikarenakan pemilik sawah tidak perlu susah payah menggarap sawah miliknya. Sedangkan bagi penggarap sistem *paron* meningkatkan perekonomian dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.